

Abstract dan Executive Summary
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN
MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN
PELESTARIAN BUDAYA USING
(STUDI DI KABUPATEN BANYUWANGI)

Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Oleh:

Muhammad Hadi Makmur, S.Sos, MAP /0007107402 (Ketua)

Akhmad Taufiq, S.S, M,Pd/0019047404 (Anggota)

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

November 2014

**KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN
MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN
PELESTARIAN BUDAYA USING**

Peneliti : **Muhammad Hadi Makmur, Akhmad Taufiq**
Mahasiswa yang terlibat : M Fajri, M Ananda Abdul Azis
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan dampak kebijakan kebudayaan yang sudah diterapkan terhadap komunitas seni dan tradisi budaya Banyuwangi, khususnya Using, untuk mendiskripsikan pola relasi antar pelaku budaya dengan pemerintah daerah serta untuk menggambarkan konstruksi model kebijakan daerah untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal Banyuwangi, khususnya Using. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif-kualitatif dengan analisis triangulasi, analisis isi dan permodelan kebijakan. Metode untuk memperoleh data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa kebudayaan Using menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Dari hasil penelitian terkait budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan daerah-Bupati, pelaku budaya lokal, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, nilai ekonomis, politik, spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas dan fantasi-hiburan warga masyarakat. Beberapa Dampak dari kebijakan serta relasi yang muncul adalah dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri. Sementara konstruksi model kebijakan diarahkan pada model public private partnership serta public community partnership dengan menfokuskan pada pengembangan budaya dan tradisi lokal Banyuwangi untuk penguatan ekonomi daerah.

Kata-kata kunci: *kebijakan; budaya Using; konstruksi identitas, komodifikasi budaya*

Abstract

The purpose of this study to describe the impact of cultural policies that have been applied to the arts community and cultural traditions Banyuwangi, to describe the pattern of relations between cultural actors with local government, and to describe the construction of a model of regional policy for the preservation and development of local culture Banyuwangi, especially Using. This study is a descriptive-qualitative triangulation analysis, content analysis and policy modeling. Methods for obtaining the data is done through observation, interviews, documentation and study literature and FGD. The study found that culture Using an entity to continue to be contested in the space representation of the interests of each party. Occurred relation of each actor in a dynamic space. From the research results related to culture Using in Banyuwangi found several groups of actors, namely the private sector, local leaders-Regent, local cultural actors, community leaders and the general public. This relation represents dialectically, economic value, politics, spirituality and identity and needs replication-fantasy entertainment community. Some of the impact of policies and relations that arises is the impact of social, economic and cultural context Using his own. While the construction of models of policies directed at public private partnership model as well as the public community partnership to focus on the development of local culture and tradition Banyuwangi to strengthening local economies.

Key words: policy; Using culture; construction of identity, cultural commodification

Executive Summary

KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA USING

Peneliti : **Muhammad Hadi Makmur¹, Akhmad Taufiq²**
Mahasiswa yang terlibat : M Fajri³, M Ananda Abdul Azis⁴
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan berbagai bentuk budaya di daerahnya. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap kritis terhadap fakta sejarah dan serta memperkuat ketahanan bangsa.

Kebudayaan sebagai identitas komunitas bukan hanya dipahami sebagai pembeda dengan komunitas lain, melainkan sebagai suatu hal yang dapat digunakan untuk mengenal kehidupan komunitas, cara-cara komunitas menyusun pengetahuan, menampilkan perasaan, dan cara mereka bertindak. Hal tersebut senada dengan pemikiran Taylor (Ritzer dan Goodman, 2008), bahwa kebudayaan dapat diartikan sebagai pandangan hidup dari sebuah komunitas atau kelompok. Aspek kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional bukan saja dinilai seberapa banyak penghargaan lencana kebudayaan dan pameran unsur kebudayaan, melainkan

¹ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

² Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra, FKIP Universitas Jember

³ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

⁴ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi FISIP Universitas Jember

mengakui eksistensi serta mengakomodasi kepentingan setiap komunitas dan budaya lokal dalam kehidupan berbangsa.

Namun dampak dari otonomi daerah, kebijakan tertentu termasuk terkait kebijakan kebudayaan seringkali digunakan untuk kepentingan pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik suatu wilayah. Semacam ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan untuk menunjukkan secara artifisial identitas mereka terhadap kepentingan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, termasuk komunitas budaya. Sehingga dikawatirkan kebijakan daerah terkait pengembangan dan pelestarian kebudayaan dibiarkan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan kekuasaan politik lokal, yang justru kontra produktif dengan maksud pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu sendiri.

Pada penelitian awal (pertama) ditemukan bahwa seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Muncul dan berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan di wilayah kabupaten Banyuwangi, yaitu rehabilitasi dan kontrol kebudayaan, pembentukan identitas utama/pusat kebudayaan dan ketiga wacana re-identitas dan promosi kebudayaan. Terdapat tiga bentuk strategi dan program yang telah dijalankan dalam Kebijakan kebudayaan pemerintah kabupaten banyuwangi. pertama pengembangan pendidikan, kedua pembangunan simbol atau situs dan ketiga penyiaran, pementasan dan pagelaran karya kebudayaan lokal termasuk budaya Using. Sehingga selanjutnya perlu dilihat bagaimana relasi antar aktor, dampak sehingga tergambarkan model kebijakan untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Using secara utuh.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tahap II ini adalah :

1. Bagaimana pola relasi antar komunitas pelaku budaya, pelaku komunitas budaya dengan pemerintah di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana dampak atas kebijakan dan relasi tersebut terhadap keberadayaan atau kelestarian dan perkembangan kebudayaan Using?
3. Bagaimana model kebijakan daerah yang bisa memberikan konstruksi pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal, khususnya kebudayaan Using?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, sehingga akan terdiskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan wilayah penelitian di kabupaten Banyuwangi. informan yang digunakan adalah; informan dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, dinas pendidikan dan tokoh budaya dan pegiat kesenian tradisi Banyuwangi. Untuk memperoleh data yang perlukan, dilakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan keabsahan dan kepercayaan data peneliti melakukan triangulasi data baik secara metode maupun sumber. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model milles & Huberman, teknik ini menurut Sugiono,(2008). dimulai dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

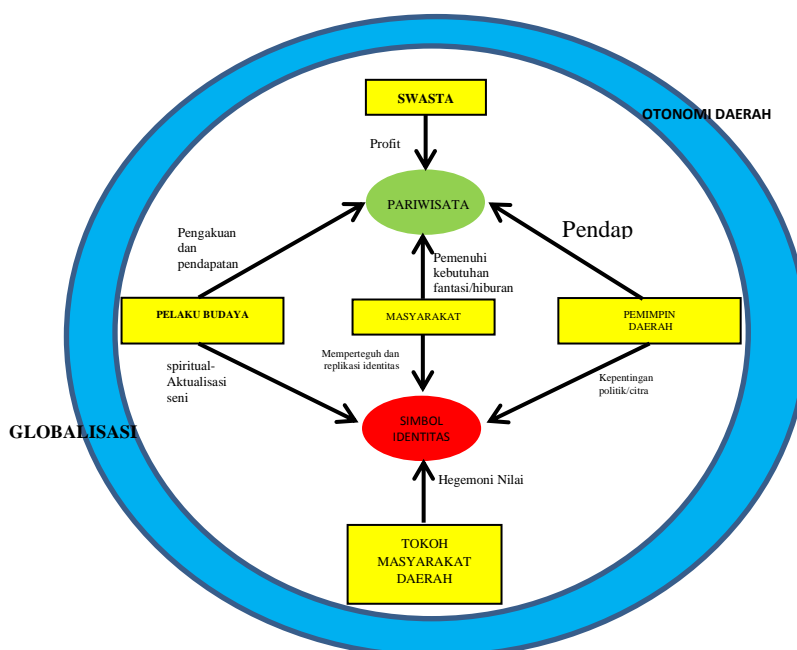
Relasi Aktor Dalam Ruang Kebijakan Kebudayaan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebudayaan menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Di sini terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Bagi Bupati sebagai penguasa atau pimpinan pemerintahan daerah kebudayaan Using dihadirkan sebagai entitas yang memiliki makna potensial, baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi budaya yang berkembang di Banyuwangi seperti budaya Using menjadi sumber potensial bagi perkembangan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga entitas budaya dikemas dan dipromosikan sedemikian rupa menjadi komoditas yang bisa dinikmati dan menarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti pada saat kepemimpinan bupati Azwar Anas, keberagaman budaya Banyuwangi dikemas dalam program rutin tahunan dalam bentuk Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), yang diakuinya sangat besar sumbangannya bagi penerimaan daerah. Secara politik, bahwa hampir semua Bupati di Banyuwangi, sejak Masa Supaat sampai Bupati

Azwar Anas, berupaya untuk menunjukkan pada masyarakat sebagai konstituennya akan kepedulian dan perhatiannya pada budaya melalui kebijakan dan program mereka. Seni dan tradisi Using di sini sebagai sarana bagi pemimpin untuk menunjukkan akan diri mereka sebagai yang peduli dan membesarkan identitas budaya “wong Banyuwangi” atau setidaknya membuat teridentifikasi “kebanyuwangian”-nya. Atas hal ia patut untuk didukung dan mendapatkan legitimasi oleh kelompok masyarakat di Banyuwangi khususnya Using.

Bagi pelaku dan pegiat seni dan tradisi budaya. Kebudayaan bagi mereka lebih sarana ekspresi jiwa dan spiritualitas yang menunjukkan akan identitas mereka sebagai sebuah entitas kelompok yang hidup di Banyuwangi. Tetapi mereka juga tidak berada dalam realitas hidup yang hampa, sehingga seni dan tradisi yang mereka lakukan hadir sebagai bentuk pertunjukan yang dipertontonkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat audien. Bagi masyarakat Banyuwangi bahwa pertunjukan atau Even budaya yang ditonton dan dinikmati sebagai menjadi sarana pemenuhan kebutuhan akan fantasi-hiburan sekaligus juga memperteguh diri sebagai orang Banyuwangi atau setidaknya sebagai replikasi identitasnya. Sementara itu bagi tokoh masyarakat, kebudayaan Using merupakan ruang pertarungan antara nilai. Kehadiran kebudayaan sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai yang kedaerahan yang ada. Sedangkan bagi swasta kebudayaan lebih kuat dimaknai sebagai ruang potensial secara ekonomi, yang bisa menjadi peluang yang menghasilkan keuntungan. Sebuah entitas budaya seperti budaya Using juga bisa dikembangkan dan kemas secara apik sehingga bisa ditawarkan pada “pasar” yang bisa mengundang “konsumen”, yaitu masyarakat wisatawan sebesar-besarnya.

Gambar : Model Relasi aktor dalam Ruang Kebudayaan Di Banyuwangi



Sumber: Hasil Analisis

Dampak dari Kebijakan Pemerintah dan Relasi Aktor Terhadap Budaya Using

Dari kebijakan dan program pemerintah daerah Banyuwangi serta relasi kantor yang ada, dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri. Secara sosial Program dan kebijakan pemerintah daerah seperti BEC setidaknya membawa dampak sosial. Dari beberapa budaya lokal yang direpresentasikan, secara bersama-sama memberi implikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Banyuwangi yang sangat multietnis memerlukan tingkat toleransi yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diadakannya BEC dan Festival Kuwung sejak 2010 misalnya, secara sosial sebagai masyarakat merasa identitas multikultural Banyuwangi. Seperti dalam festival Kuwung ruang untuk berperan dan merepresentasikan setiap kelompok terwadahi dan sebuah wadah masyarakat Banyuwangi yang multikultur.

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang sangat antusias menghadirkan budaya lokal. Hal-hal yang bernuansa ke-lokal-an dibangkitkan kembali. Kebijakan pemerintah dengan dukungan semua pihak menunjukkan komitmen untuk melakukan revitalisasi budaya yang sesuai dengan tuntutan ke-kini-an. Kebudayaan menjadi sesuatu yang bersifat transformatif, yang terus bergerak membentuk modelnya dari waktu ke waktu. Dalam konteks yang substantif kebijakan dan relasi yang ada menjadi ruang dialektik yang melibatkan sebegini besar para aktor untuk terus turut serta memikirkan dan merencanakan model pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Banyuwangi.

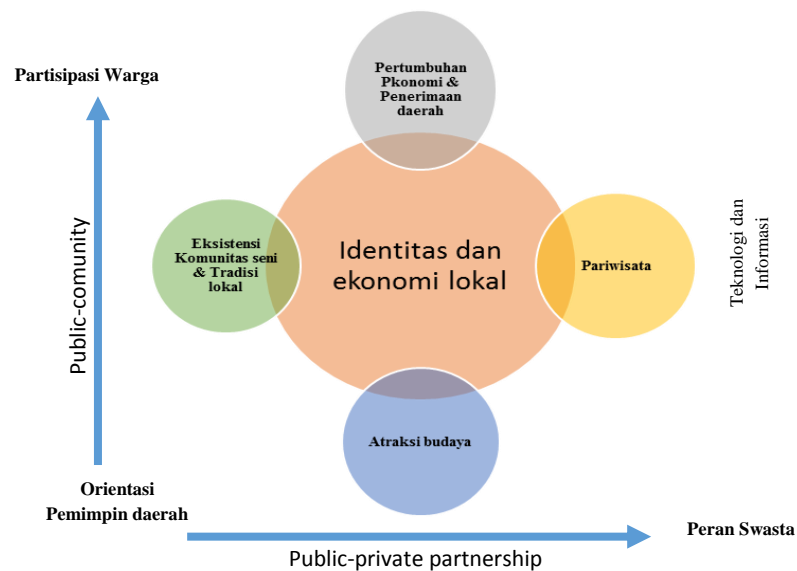
Bagi masyarakat awam, mereka memerlukan sesuatu yang bersifat nyata dan memberikan mereka manfaat terutama secara material. Di saat yang sama mereka juga bisa turut serta melestarikan budaya lokal. Kebijakan terkait budaya di Banyuwangi dari sisi ekonomi dapat dilihat seperti dari kegiatan terkait budaya seperti BEC, festival Kuwung, Paju Gandrung secara langsung telah memberikan nilai tambah secara ekonomis, setidaknya dilapangan para pedagang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Hal ini juga diakui oleh bupati Anas bahwa keberhasilan Banyuwangi menurunkan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen adalah berkat strategi keroyokan dari banyak sektor, termasuk sumbangan dari sektor pariwisata. Seni dan Tradisi budaya lokal dipromosikan secara maksimal dan dapat menambah nilai jualnya. Implikasi ini sejalan dengan maksud ekonomi kreatif, dimana ekonomi kreatif merupakan sebuah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi produk yang dapat dikomersialkan.

Konstruksi model kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Banyuwangi

Dalam konteks kebijakan ditemukan bahwa model kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi merupakan perpaduan antara model *public-private partnership* dan *public-community partnership*. Kebijakan yang bertumpu pada public private partnership menunjukkan orientasi pemimpin daerah untuk mendorong peran komunitas dan swasta untuk mengemas seni dan tradisi lokal dalam bentuk atraksi-atraksi budaya yang disodorkan pada pasar dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi serta penerimaan daerah. Hal itu bisa ditunjukkan oleh program yang dikemas oleh daerah dalam mempromosi kegiatan-kegiatan bernuansa budaya selama 4 tahun terakhir dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh komponen, baik itu pegiat dan pelaku seni tradisi maupun peran swasta. Kegiatan besar seperti BEC, Festival Kuwung, Paju Gandrung membutuhkan dana yang besar. Pada sisi yang lain, pemerintah juga mendorong pada komunitas untuk tetap “nguri-nguri” seni dan tradisi, dengan memfasilitasi pada kelompok-kelompok seni dan tradisi agar tetap hidup. Kelompok seni dan tradisi lokal dalam hal ini berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Arah kebijakan pemerintah Banyuwangi khususnya pada kepemimpinan

bupati Azwar Anas dalam memfasilitasi untuk memajukan kesenian dan budaya lokal tersebut sangat ditekankan pada upaya pengembangan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Kelompok seni dan tradisi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dirahkan tidak saja kelompok yang berada di pusat kota tetapi juga di setiap kecamatan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah daerah agar pentas dan atraksi seni-budaya tidak tersentral di kota, tetapi juga di setiap kecamatan. Sehingga dari analisis peneliti yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat gambaran model kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian dan Pengembangan budaya lokal seperti dalam gambar di bawah.

Gambar: Model Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal



KESIMPULAN

Dari hasil sementara penelitian ini peneliti memperoleh beberapa poin kesimpulan. Pertama, kebudayaan menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Di sini terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, baik ekonomis, politik, nilai-spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas sekaligus kebutuhan fantasi-hiburan warga masyarakat. Kedua, kebijakan dan program pemerintah daerah Banyuwangi serta relasi kantor yang ada, membawa dampak baik secara sosial, ekonomi dan bagi budaya Using sendiri. Ketiga, model konstruksi kebijakan bahwa diarahkan pada model public

private partnership serta public community partnership dengan menfokuskan pada pengembangan budaya dan tradisi lokal Banyuwangi untuk penguatan ekonomi daerah. Akhirnya dari hasil penelitian ini maka beberapa hal yang peneliti sarankan yaitu, pada pemerintah daerah agar dalam pengembangan budaya using terus memperkuat keterlibatan pelaku dan memperhatikan dinamika dan konteks sosial masyarakat.

REFERENSI

- Ritzer, George dan Goodman , Douglas J . 2008. Teori Sosiologi (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D. Bandung : CV. Alfabeta
- Effendy, Bisri dan Anoegrajekti, Novi, 2004, Perempuan Dalam Ritual, Mengangan Dewi Sri Membayang Perempuan, Jurnal Srinthil, edisi 07 (November 2004): <http://srinthil.org/374/perempuan-dalam-ritual-mengangan-dewi-sri-membayang-perempuan/> (diakses 5 oktober 2013)
- Gaventa, John, 1980, *Power And Powerlessness; Quiescence And Rebellion In Appalachian Valley*, Clarendon Press, Oxford.hlm.12
- Dariharto, 2009, Kesenian Gandrung Banyuwangi, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.hlm.2-4